

BAB I

PENDAHULUAN

*“Wajah lugu kapitalis
lebih menakutkan dari pada
monster pembunuh”*
Muhamad Arsat

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia terkontrol, karena kebebasannya sering dikemas dalam struktur sosial-ekonomi dan dikendalikan oleh kelas tertentu. Ketika manusia masuk dan terlibat dalam elemen interaksi seperti aktor, mitra, relasi, aktivitas dan konteks, manusia menjadi terkontrol dan dapat menimbulkan resistensi untuk melepaskan diri dari kontrol yang ketat untuk mendapatkan kebebasannya. Perasaan moral ini harus dilihat sebagai ekspresi kehidupan sosial.

Dalam masyarakat nelayan, terdapat tiga kelas sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Namun, kelas-kelas ini memiliki kepentingan yang sangat berbeda, yang menyebabkan teka-teki atau misteri resistensi. Kelas sosial tersebut adalah Anak Buah Perahu (Sawi), Pemilih Kapal (Pinggawa), dan pemilik modal. Perbedaan kelas ini berdasarkan kepemilikan sumber daya, perasaan, sikap yang bertahan lama, dan respons terhadap evaluasi realitas sosial, budaya dan ekonomi.

Perbedaan kelas dalam masyarakat nelayan bukan hanya tentang kekayaan tapi lebih dalam, mencakup kesadaran bahwa setiap kelas memiliki kesadaran sosial yang berbeda tentang posisi dan status sosial.

Misalnya, Sawi sadar, bahwa mereka bergantung pada Pinggawa untuk mencari nafkah. Sedangkan Pinggawa sadar bahwa mereka bertugas mengorganisir kerja nelayan dan menjaga loyalitas dan mengontrol alat produksi (kapal, alat tangkap) dan mampu menentukan aturan main.

Struktur sosial tersebut terbentuk secara alami berdasarkan penguasaan sumber daya, peran dalam proses produksi, dan hubungan kekuasaan. Perbedaan kelas ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga dengan kesadaran sosial, pola hubungan, dan respons terhadap dinamika ekonomi dan budaya. Dampak dari perbedaan kelas ini tampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan nelayan, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. Perbedaan kelas dalam masyarakat nelayan membawa dampak yang kompleks, tidak hanya memperkuat struktur sosial yang ada, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dan potensi resistensi di dalam komunitas.

Secara umum, relasi nelayan dan pemilik modal bersifat resiprositas dan bisa bersifat konflik laten dan manifes. Holton (1992) juga mengatakan terdapat relasi lain yang bersifat eksploitatif yang memainkan peran penting dalam pembentukan resistensi. Namun, nelayan Bajo menganggap dirinya tertindas karena konflik laten dan konflik manifes. Dengan demikian, sejarah nelayan Bajo sebenarnya menghasilkan subjek emansipatoris karena pada tahap tertentu, nelayan Bajo tidak lagi dieksploitasi dan semua nelayan dapat bekerja sesuai kemampuan dan mendapatkan yang diinginkannya.

Hubungan ekonomi nelayan Bajo dan pemilik modal bersifat deterministik karena konflik dan perubahan dapat terjadi. Perubahan sosial dan politik bergantung pada konflik, bahkan nelayan Bajo terbentuk dari perselisihan antar kelompok utama, yang berfokus pada kekuatan dan persaingan dan perubahan. Nelayan bajo yang memiliki kekuasaan berusaha mengontrol dan melakukan resistensi terhadap pemilik modal yang memiliki kekuasaan. Resistensi tersebut karena persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya, seperti kekuasaan dan kekayaan, yang muncul dari hubungan antara kelompok nelayan dan pemilik modal.

Sebagaimana dinyatakan oleh Giles dan Evans (1986), perselisihan kelompok dapat terjadi karena status sosial dan jabatan. Ketika suatu kelompok mengambil alih sumber daya, kecenderungannya adalah menetapkan aturan dan peraturan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Ini mendorong resistensi karena kelompok tertentu memiliki kekuatan dan akses ke sumber daya yang diinginkan. Akibatnya, terjadi perubahan sosial yang tidak dapat dihindari.

Resistensi kelas selalu disebabkan oleh alasan ekonomi dan motivasi praktis. Perbudakan atau pengambahan juga akan muncul secara bertahap ketika minoritas memiliki monopoli kekuasaan (Russell, 1988). Selain itu, dinamika resistensi nelayan Bajo terhadap pemilik modal terjadi dalam berbagai arena spesialisasi substantif, seperti organisasi, budaya dan komunitas.

Resistensi muncul sebagai bentuk kesadaran terhadap ketimpangan distribusi sumber daya dan nilai, seperti kesejahteraan material, kekuasaan, dan prestise. Ketimpangan ini secara sistematis memunculkan ketegangan antara kelompok nelayan Bajo dan pemilik modal. Dalam konteks tersebut, konflik semakin meningkat terutama antara nelayan yang memiliki akses terhadap sumber daya.

Eskalasi konflik terjadi karena ketegangan atau pertentangan antara dua pihak semakin meningkat, baik dari segi intensitas, cakupan, hingga bentuk kekerasan. Konflik yang awalnya hanya berupa ketidakpuasan atau resistensi kecil, berkembang menjadi pertentangan terbuka, bahkan kekerasan fisik, tergantung pada dinamika hubungan kekuasaan, persepsi ketidakadilan, dan strategi yang dipilih masing-masing pihak. Dalam kasus nelayan Bajo dan pemilik modal, awalnya hanya ada keluhan atau resistensi pasif. Perlahan namun pasti, ketimpangan dan ambiguitas sumber daya dan nilai selalu terjadi.

Faktor-faktor yang mempercepat eskalasi konflik sangat beragam yaitu meningkatnya ketidakpercayaan, tindakan represif dari pihak yang lebih kuat, simbolisasi identitas kelompok Bajo sebagai "yang tertindas" melawan pemilik modal sebagai "yang menindas" membutuhkan intervensi pihak ketiga, sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang dilakukan oleh pemilik modal yang memiliki kekuasaan lebih besar untuk mempertahankan struktur sosial yang menguntungkan. Tindakan

represif tidak hanya berbentuk kekerasan, tetapi juga penciptaan norma sosial yang membenarkan ketidakadilan.

Kondisi-kondisi ini menciptakan nelayan yang ter subordinasi menyadari pentingnya untuk mengetahui dan mengubah ketimpangan yang ada. Namun, untuk mendapatkan kebebasan karena subordinat yang lebih terorganisir, tercipta resistensi dan kekerasan tertutup yang menghendaki perundingan dan kesepakatan antara nelayan dan pemilik modal, agar tetap beraktivitas. Nelayan yang tidak melakukan penangkapan akan memiliki banyak utang. Akibatnya, pemilik modal melakukan penyitaan perahu untuk membayar hutang nelayan. Fakta ini berbeda dengan yang diharapkan nelayan, sehingga memungkinkan resistensi. Pada keadaan seperti ini, nelayan menunjukkan resistensi yang nyata untuk keluar dari otoritas dan penguasaan pemilik modal.

Sangat penting bagi nelayan Bajo untuk hidup dalam resistensi dengan pemilik modal dan bersaing untuk menguasai ekonomi, budaya, dan politik. Fenomena kontestasi dan dominasi yang terjadi merupakan ciri penting dari pengorganisasian nelayan, terutama dari perspektif yang menunjukkan derajat strata sosial. Secara umum, resistensi dimulai dengan kesulitan yang dialami nelayan Bajo dan kepentingan pemilik modal yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya, sehingga nelayan Bajo selalu hidup dalam kondisi subordinat. Pemilik modal selalu mendominasi dan mempertahankan kekuasaan dengan memaksa

kelompok nelayan untuk mengikuti regulasi yang tidak tertulis karena hanya berlandaskan pada kesepakatan.

Karena nelayan dianggap tidak berdaya oleh pemilik modal, kenyataan ini memicu perubahan yang tidak dapat dihindari. Bentuk-bentuk destruktif ini cenderung terjadi secara konsisten dan berkontribusi pada sejumlah eksponen seperti dekomposisi tenaga kerja, serta munculnya kelas sosial nelayan, yang pada dasarnya adalah kelas yang berbeda dan terdiri dari berbagai hirarki kekuasaan. Karena aktivitas yang maksimal, nelayan mendapat manfaat yang kecil dari proses tersebut, karena nelayan tidak akan menjual hasil tangkapannya kepada pemilik modal yang telah lama menguasai ekonomi.

Menurut Dahrendorf (1959), resistensi tercipta karena terdapat kepentingan kelas, hirarki kekuasaan, kewenangan, dan pertentangan dalam masyarakat yang bersifat kondisional dan permanen. Dalam perspektif ini, nelayan Bajo mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengatasi dan mengendalikan perlawanan yang berkelanjutan. Karena itu, resistensi yang berkembang akan dapat menghancurkan karena perlawanan revolusioner dapat membongkar hegemoni pemilik modal agar tercipta kesadaran menyeluruh melalui perjuangan keras dan nyata.

Eksplotasi dan penghisapan manusia diciptakan oleh pemilik modal yang hidup dari keuntungan dan penguasaan sumber daya. Karena peran struktural pemilik modal lebih penting daripada kesadaran dan moralitas nelayan, konsekuensi yang ditimbulkannya bukanlah penghapusan

resistensi, tetapi perubahan ekonomi akibat konflik kepentingan antara nelayan dan pemilik modal. Perubahan menyeluruh dari nelayan dimulai dengan sikap dan tindakan untuk menentang dan agar tercipta perubahan sosial, budaya dan ekonomi.

Gerakan perubahan yang cepat atau bahkan radikal, menjadi satu-satunya cara nelayan Bajo dapat maju dan berkembang. Tujuan akhirnya adalah "terlepas dari eksploitasi dan terciptanya kesejahteraan". Fakta bahwa sejak awal nelayan Bajo telah memilih hidup di bawah kontrol pemilik modal bukanlah kebetulan, itu adalah realitas yang mampu membentuk organisasi politik nelayan berdasarkan prinsip keadilan sosial. Selain itu, resistensi akan sangat berarti karena adanya solidaritas, dan metode bekerja untuk mendapatkan hasil tangkapan akan menentukan kesadaran terhadap penderitaan yang dialami.

Seharusnya, kesadaran terhadap nilai ekonomi komoditas Ikan, Telur Ikan Terbang, dan Gelembung Ikan Kakap yang ditentukan oleh pemilik modal dapat dinilai secara objektif, bukan hanya dari pergerakan pasar tapi melalui perjuangan dan kerja keras nelayan. Nelayan akan menerima pendapatan yang cukup untuk memperbaiki kondisi ekonominya dan memenuhi kebutuhan keluarganya apabila terdapat stabilitas harga hasil tangkapan. Dari pencairan tersebut, telah melahirkan pandangan dunia bahwa *"agar bisa sejahtera nelayan harus bekerja maksimal untuk memperoleh keuntungan (lamong ada' te ale' tannah, harus te nganjame malasso turros mane nummute kauntungan)*.

Agar stabilitas harga hasil tangkapan tercipta, nelayan melakukan resistensi sebagai representasi kesadaran kolektif yang ditentukan oleh basis material ekonomi dan perubahan sosial. Akan tetapi, agar resistensi dapat berhasil, nelayan Bajo harus memikirkan potensi kegagalan, prasangka, dan sikap negatif terhadap sesama nelayan Bajo. Menurut Jhonson (1986), prasangka dapat berasal dari pemahaman perbedaan budaya, ras dan stereotip yang menyertainya. Sikap itu menunjukkan resistensi, sehingga realitas mengalami perubahan besar atau perubahan dialektik yang terus-menerus.

Melalui perjuangan kelas dan kritik radikal terhadap pemilik modal, nelayan Bajo melakukan penangkapan dan menciptakan resistensi secara intens terhadap pemilik modal. Dalam proses resistensi tersebut, menunjukkan bahwa nelayan telah memenangkan pertempuran ekonomi, melepaskan diri dari penindasan, bersaing untuk memperoleh sumber daya secara sehat, menipisnya ketidaksetaraan, berakhirnya eksploitasi, dan hilangnya keterasingan.

Dengan melihat kenyataan ini, menjadi sangat menarik pengkajian secara menyeluruh terhadap nelayan Bajo dan relasinya dengan pemilik modal, karena terdapat berbagai karakteristik resistensi, kemajuan kelas dan praktik dominasi telah menjadi wacana yang sangat penting untuk dieksplorasi secara mendalam. Dari resistensi nelayan Bajo, yang paling penting adalah gerakan penyelamatan agar terlepas dari eksploitasi dan dominasi pemilik modal. Ini berarti bahwa nelayan Bajo telah mengambil

langkah progresif-revolusioner untuk mencapai transformasi sosial, kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan signifikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pemilik modal terhadap nelayan Bajo yang terdominasi dalam hubungan kerja ekonomi?
2. Bagaimana praktik dominasi dari hubungan kerja ekonomi?
3. Bagaimana kapital nelayan Bajo melakukan resistensi?
4. Bagaimana historisitas dan bentuk resistensi nelayan Bajo terhadap pemilik modal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan secara holistik, persepsi pemilik modal terhadap nelayan Bajo yang terdominasi dalam hubungan kerja ekonomi.
2. Menjelaskan secara holistik, praktik dominasi dari hubungan kerja ekonomi dengan nelayan Bajo.
3. Menemukan konsep tentang kapital nelayan Bajo untuk melakukan resistensi.
4. Menemukan konsep tentang historisitas dan bentuk resistensi nelayan Bajo terhadap pemilik modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk nelayan Bajo. Membuka cakrawala berpikir kritis dan mengeluarkan nelayan Bajo dari realitas diri yang mengalami dominasi dan diskriminasi yang berlangsung sekian lama, akan tetapi tidak pernah disadari karena bersifat terselubung dalam struktur kesadaran dan tindakan pemilik modal.
2. Manfaat untuk pemilik modal. Sebagai referensi introspeksi diri, membangkitkan kesadaran kritis, terbuka terhadap kritik dan terciptanya perilaku yang humanis, karena persepsi dan praktik dominasi yang dilakukan selama ini telah menciptakan nelayan Bajo terpinggirkan dari derajat kemanusiaan (alienasi).
3. Manfaat akademik. Meningkatkan diskursus kritis dan emansipatoris tentang realitas kesadaran kelas antara pemilik perahu (*punggawa*) nelayan Bajo dan pemilik modal, yang melahirkan resistensi namun selama ini belum dipahami secara komprehensif dan mendalam.
4. Manfaat untuk pemerintah. Menjadi referensi dalam mengambil keputusan, evaluasi kritis dan menemukan solusi tentang gejala konflik sosial-budaya yang selama ini tidak disadari sebagai konflik terselubung dan sewenang-wenang oleh pemilik modal terhadap nelayan Bajo sehingga kehilangan nilai kemanusiaannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Banyak peneliti telah melakukan penelitian tentang nelayan dan hubungan mereka dengan pemilik modal. Misalnya, Wianti dkk (2012) menyatakan bahwa penetrasi budaya kapitalis dapat mengubah nelayan Bajo dan menyebabkan perubahan struktural. Memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keuntungan adalah tujuan dari strategi produksi nelayan yang dipengaruhi oleh kapitalisme. Pola tindakan ini mengarah pada ekspansi usaha, akuisisi kapital, dan jaringan bisnis.

Selain itu, Sudarmono dkk. (2012) menyatakan bahwa nelayan berada di posisi terendah dalam struktur sosial yang dikenal sebagai patron-klien. Nelayan tidak menganggap dirinya lebih baik karena patron memiliki penguasaan ekonomi yang lebih besar, memahami perubahan dan perkembangan teknologi penangkapan yang disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi yang mengarah pada peningkatan komoditi tangkapan nelayan.

Sejak dikumandangkannya "revolusi biru" atau modernisasi perikanan pada tahun 1970, menurut Kusnadi (2016), telah terjadi babak baru dalam sektor perikanan yang berpegang pada prinsip kapitalistik. Pemerintah mendukung ekonomi nelayan dengan menghadirkan koperasi dan mendukung pembaharuan teknologi untuk mendukung orientasi pertumbuhan ekonomi nelayan. Meskipun demikian, kebijakan modernisasi

perikanan mendukung penerapan kapitalisme pada nelayan, yang berkontribusi pada kelangkaan dan penurunan hasil tangkapan nelayan.

Artanto (2017), agar relasi orang Bajo dengan lingkungan tetap terjaga dengan baik, mereka mempertahankan kearifan lokal *Bapongka* dengan mempertahankan aturan dan larangan atau pantangan untuk menjaga laut. Menurut Atamimi et al. (2018), penguasaan alat produksi telah menghasilkan eksploitasi melalui mekanisme struktural. Akibatnya, nelayan tidak dapat memperluas relasi sosial mereka dengan struktur yang lebih tinggi.

Menurut Mukhramani (2018), orang Bajo menggunakan strategi bertahan hidup untuk menghindari konflik. Mereka melakukan hubungan aktif dan pasif. Nelayan menjual hasil tangkapannya di pasar tradisional. Dai dan Manahung (2020) menyatakan bahwa orang Bajo memiliki kearifan lokal, yang dianggap benar dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kearifan lokal memainkan peran penting dalam menentukan harkat dan martabatnya sebagai suku laut. Menurut Ertor, dkk (2020), nelayan percaya bahwa negara tidak mampu menyelamatkan kehidupan mereka dan mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan. Ini disebabkan oleh tengkulak, legitimasi koperasi nelayan oleh negara, dan diskriminasi pemilik modal.

Hapsari, dkk (2020) menyatakan bahwa dalam gerakan sosial nelayan, selalu ada aktor yang menggerakkan dan berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Aktor-aktor ini menggunakan strategi dan taktik yang

dapat mendorong massa nelayan untuk menentang kebijakan pemerintah. Rizari, Sudarmono, dan Hari (2020), relasi patron-klien dalam masyarakat nelayan menjadi masalah penting yang sulit dipecahkan karena telah lama bertahan dan dibungkus dengan prinsip klientelisme, intervensi, dan ketergantungan.

Arazie (2020), mengatakan bahwa lemahnya pemerintah dalam penegakan hukum kelautan, sehingga nelayan melakukan perlawanan karena mereka mengalami kerugian, penurunan tangkapan, kerusakan alat tangkap dan penurunan pendapatan karena hadirnya kapal *trawl* yang melakukan penangkapan secara berlebihan. Untuk melakukan perlawanan, nelayan membentuk Serikat Nelayan untuk mendapatkan posisi tawar (*bargaining*) dari pemerintah untuk menghindari perlawanan sporadis.

Syefriyeni dan Rosie (2020) mengatakan bahwa orang Bajo membangun sikap toleransi berasal dari cara mereka hidup mereka. Orang-orang Suku Bajo percaya pada keselarasan dengan alam dan menjaga keseimbangan laut sebagai sumber kehidupan mereka. Orang bajo tidak mudah terprovokasi karena kecenderungan mereka untuk hidup berdampingan dan menghindari konflik. Masyarakat Suku Bajo memiliki juga memiliki nilai sosial budaya yang mendukung toleransi, seperti sikap tenggang rasa, gotong royong.

Meskipun demikian, Arief (2021) mengatakan nelayan melakukan perlawanan karena pola pikir dan metode produksi kapitalisme. Namun, karena penetrasi kapitalisme dalam bentuk modal dan teknologi telah

menyebabkan perubahan sosial, nelayan menjadi tidak berdaya. Akibat dialektika ini, nelayan mengalami dehumanisasi karena mereka tidak mampu meredefinisi dan memahami pergerakan kapitalisme yang terus berubah. Sehingga, identitas budaya suku Bajo berubah sebagai akibat dari berinteraksi langsung dengan budaya daratan.

Menurut Haerulloh dkk (2021), kontak dengan pemilik modal mempengaruhi keputusan suku Bajo untuk menetap karena terdapat stabilitas harga hasil tangkapan. Yunus dan Mondong (2021) mengatakan bahwa suku Bajo mempertahankan tradisi melaut dan memperkuat identitas etnik karena mereka sadar bahwa hanya identitas etnik yang dapat menjauhkan mereka dari konflik. Salipu, dkk (2022), orang Bajo sangat dilematis, antara menentang perubahan dan mempertahankan identitas serta menerima perubahan dan mengembangkan identitasnya untuk menghindari konflik.

Akan tetapi, dari berbagai penelitian yang telah saya jelaskan, tidak satupun menjelaskan tentang resistensi nelayan Bajo terhadap pemilik modal. Sedangkan saya dalam disertasi ini mengeksplorasi secara komprehensif aspek mendasar resistensi yaitu memadukan teori genealogi, teori kapitalisme, teori relasi kuasa dari Michel Foucault, dan teori resistensi dari James C. Scott. Seluruh teori tersebut menjadi pegangan kritis untuk membongkar dan menemukan kekuasaan yang tidak hanya represif tapi juga produktif, kekuasaan yang bersifat kontrol sosial, kekuasaan bukan hanya menindas atau memaksa, tapi juga membentuk cara berpikir,

membentuk perilaku dan membentuk semua yang dianggap normal atau benar melalui mekanisme disiplin dan pengawasan.

Selain itu, relasi antara nelayan Bajo dan pemilik modal bukan hanya relasi yang menguntungkan, tetapi menyembunyikan semangat resistensi melalui kontrol sosial yang halus dan menekan. Intinya, walaupun di depan nelayan Bajo tampak patuh, tetapi di belakang banyak tindakan kecil yang dilakukan untuk melawan kekuasaan pemilik modal. Dengan demikian, nelayan Bajo memilih cara-cara yang lebih aman, tidak frontal, tapi efektif untuk menjaga harga diri untuk melawan penindasan, agar keluar dari eksploitasi dan dominasi pemilik modal.

B. Konsep tentang genealogi

1. Metode genealogi

Istilah "genealogi" digunakan untuk menjelaskan sejarah secara komprehensif tentang ilmu pengetahuan dan cara-cara wacana ilmiah atau ilmu pengetahuan (konsep dan teori) berkembang di setiap zaman. Menurut Michel Foucault (1977), episteme termasuk dalam setiap genealogi, karena aktor membuat atau menggunakan wacana ilmiah yang berbeda untuk setiap zaman. Epistema adalah alat diskursus yang membangun diskusi ilmiah dan non-ilmiah.

Genealogi juga tidak mencari asal-usul murni (origin), melainkan menelusuri proses sejarah yang penuh konflik, diskontinuitas, dan pergulatan kekuasaan. Ciri khas metode genealogi foucault adalah untuk

melacak perubahan ide secara historis, tapi bukan untuk menemukan "satu titik awal," melainkan untuk melihat pergeseran-pergeseran kecil yang penuh konflik. Genealogi juga digunakan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik "kebenaran" atau "pengetahuan" yang diterima, menolak sejarah linear atau sejarah pahlawan (sejarah resmi), serta menaruh perhatian pada praktik kecil, aturan tak tertulis, dan ketidakjelasan dalam sejarah.

Secara dialektis, metode genealogi adalah pemeriksaan menyeluruh tentang pemikiran dan pemaknaan untuk menelusuri asal-usul kekuasaan, norma, dan kebenaran. Bukan untuk mencari "asal mula murni" (seperti sejarah biasa), tapi untuk mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja dalam membentuk apa yang dianggap benar, normal, dan sah di suatu zaman. Foucault menunjukkan bahwa nilai-nilai, institusi, dan pengetahuan bukan alami atau netral. Semua itu lahir dari perjuangan kekuasaan, sejarah, dominasi politik, dan mekanisme sosial. Misalnya "Kegilaan" dalam sejarah bukan sekadar masalah medis, tapi hasil dari proses sosial-politik yang meminggirkan orang-orang yang dianggap menyimpang. Konsep "penjahat" dan "hukuman" dalam masyarakat modern juga hasil evolusi kekuasaan, bukan semata-mata tentang moralitas.

Agar metode genealogi menjadi utuh, harus dipadukan dengan diskursus (Wacana) yang dipahami sebagai jaringan kata, konsep, praktik, dan institusi yang menghasilkan kebenaran dalam suatu bidang tertentu. Diskursus membatasi yang bisa dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan, dan

diupayakan untuk memahami unsur penting seperti siapa yang mengontrol diskursus, mengontrol definisi kebenaran dan norma sosial. Diskursus menciptakan subjek yaitu misalnya, bagaimana seseorang menjadi "pasien", "penjahat", atau "orang normal" lewat bahasa dan institusi.

2. Genealogi kekuasaan (power)

Foucault (1977) mengatakan bahwa konsep kekuasaan (power) dalam ilmu sosial selama ini sering dipahami sebagai sesuatu yang bersifat hierarkis dan represif, kekuasaan dimiliki oleh negara, elite politik, atau pihak dominan untuk mengendalikan yang lemah. Namun, Michel Foucault menawarkan pandangan yang radikal berbeda, ia berargumen bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki, melainkan sesuatu yang mengalir dan bekerja dalam seluruh relasi sosial. Kekuasaan menurut Foucault (1977) tidak hanya menindas, tetapi juga menciptakan norma, membentuk identitas, dan mendefinisikan kebenaran melalui jaringan institusi, praktik sosial, dan diskursus.

Pemikiran ini penting untuk dipahami terutama dalam konteks masyarakat modern karena mekanisme kontrol tidak lagi berbentuk kekerasan langsung, melainkan pengawasan, normalisasi, dan disiplin tubuh. Kekuasaan juga terspesialisasikan melalui ilmu pengetahuan, melalui cara seperti ini power terdesentralisasi dan terpluralisasi. Menurut saya, kekuasaan juga dimiliki pemilik modal dan nelayan yang berfungsi untuk mengontrol dan melawan, sehingga individu didisiplinkan dan

dinormalkan. Setiap lembaga atau individu melaksanakan powernya di lingkungannya masing-masing. Dengan kata lain power ada dimana saja dan bersifat tidak tunggal atau tidak hanya ada pada dominasi pasar atau modal.

Foucault (1978) memperluas diskusinya mengenai *power* disiplin dari yang semula berfokus pada normalisasi individu produktif kemudian gagasan ini berkembang menuju bio-power. Misalnya pada nelayan Bajo, mereka mulai dari kepemilikan Bio-Power yang terfokus pada pengaturan kehidupan untuk melakukan resistensi kepada pemilik modal. Di sisi lain, bio-power yang ada pada pemilik modal melakukan yang disebut sebagai "kekuatan/pengetahuan" dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada individu, yang pada gilirannya meningkatkan dan mengatur kehidupan nelayan secara keseluruhan, dan ditopang dengan program-program yang bertujuan meningkatkan keterampilan yang menunjukkan kekuatan dan pengetahuan.

Gagasan Foucault (2002), mengungkap bahwa kekuatan sebagai komoditas dan dapat menjadi sistem dominasi antara yang kuat dan yang lemah. Selanjutnya, Foucault (2002) mendesentralisasi kekuatan terpusat dan mempelajari berbagai bentuk kekuatan yang dimiliki, diajukan, dan dampaknya. Seiring dengan penyebaran daya ke objek, daya menyebar dalam jaringan. Power bekerja dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ini dimulai dengan gagasan penerapan perincian kecil sebelum membuat tindakan dan keputusan yang besar. Power tidak berasal dari

ideologi, tapi berasal dari pengetahuan dan praktik untuk merancang ide-ide menjadi nyata.

Pencairan asal usul, juga dikenal sebagai genealogi, akan menemukan sesuatu yang berbeda dengan asumsi sebelumnya bahwa genealogi digunakan untuk menemukan rahasia dan esensi yang abadi. Genealogi digunakan untuk membuktikan bahwa sejarah kehidupan nelayan Bajo, tersembunyi esensi dari perlawanan kepada pemilik modal dan semakin membuka rahasia realitas kehidupan mereka dari waktu-ke waktu. Dengan demikian, yang menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam genealogi dalam penelitian ini adalah asumsi-asumsi yang menunjukkan bahwa epistema dan ilmu pengetahuan berkembang tidak linier akan tetapi berkelanjutan dan tidak selalu bersifat progresif.

Namun harus dipahami bahwa dari perkembangan yang berkelanjutan, terdapat retakan cara berpikir manusia dalam perkembangan budaya yang memiliki rasionalitas dan irasionalitas terkandung dalamnya meskipun nalar hanyalah satu instrumen di antara sekian banyak aktor yang lebih besar dan penting dalam drama kehidupan nelayan dan pemilik modal. Genealogi resistensi antara nelayan dan pemilik modal, memberikan kepada pemahaman melalui mata rantai diskursus (wacana). Dengan hadirnya genealogi atau penelusuran atas wacana maka pusat aktivitas nelayan dan pemilik modal bukan sebagai teks yang bersifat khusus, namun tersembunyi dalam lautan makna yang bersifat luas dan universal.

Melalui genealogi, kehadiran bahasa bukan hanya meniru atau mencerminkan realitas akan tetapi membentuk dan menciptakannya serta melihat realitas bahasa dan maknanya sebagai sesuatu yang bersifat cair, sehingga berpotensi untuk selalu terbuka dan dapat dikembangkan. Instabilitas makna memungkinkan untuk pembaca dapat mendefinisikan kembali dan mengkonstruksi subjek resistensi sebagai wujud konstruksi sosial budaya.

Realitas wacana yang diterima secara implisit sangat menentukan berbagai model atau bentuk argumentasi dan konstruksi dari rasionalitas subjek. Jadi yang terpenting dalam genealogi adalah bukan wacana historis semata, akan tetapi atas dasar fondasi wacana sejarah yang terbangun. Melalui genealogi, sangat penting untuk menjelaskan fenomena yang tidak kelihatan dan tersembunyi dalam kesadaran dari fenomena resistensi antara nelayan Bajo dan pemilik modal. Penelusuran geologis tersebut adalah untuk menentukan landasan pengetahuan atau epistema dan kekuasaan tertentu.

Dari pemikiran inilah dapat dipahami bahwa genealogi dan praktik diskursif sebagai akar kehidupan sosial, dan kajian wacana secara esensial adalah kajian tentang kekuasaan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pertarungan kekuasaan antara nelayan Bajo dan pemilik modal dilaksanakan agar suatu wacana terwujud yaitu untuk menemukan pemenang dari resistensi yang terjadi.

C. Teori Kapitalisme

1. Antropologi dan Kapital

Antropolog Michael Blim (2000: 34) menyatakan bahwa kapitalisme sedang melingkupi kehidupan manusia. Dalam amatan Blim, sejak 1963 hingga 1999 kajian kapitalisme di dalam disiplin antropologi telah berlipat ganda tentang berbagai varian kapitalisme, mulai dari norma-norma kapitalisme yang mendasari praktik kapitalisme, dampak keberadaan korporasi global terhadap komunitas internasional, etnografi bentuk-bentuk kapitalisme lokal, pembagian kerja yang baru, kendali atas segmentasi pasar tenaga kerja berdasarkan gender dan kesukubangsaan, praktik konsumsi dan budaya konsumen dan munculnya kelas baru dalam dunia ketiga, hingga munculnya pasar pekerja migran global yang terus bergerak ke berbagai negara.

Sepanjang paruh kedua abad ke-20, terdapat tiga paradigma pokok yang melandasi penelitian-penelitian antropologi kapitalisme, yaitu Neo-Weberian, neo-Marxisme, dan neo-institusionalisme (Blim, 2000). Ketiganya dilabeli neo-institusionalisme karena bersumber dari diskursus klasik kapitalisme sepanjang abad ke-20, sekaligus menambah berbagai aspek penelitian yang disesuaikan dengan perkembangan kapitalisme kontemporer.

Antropologi neo weberian, pada umumnya berangkat dari tesis Max Weber bahwa kapitalisme merupakan gejala historis. Keberadaannya terikat pada keragaman budaya tertentu. Pranata dan struktur sosial

kapitalisme yang berdiri di atas sistem pasar nasional yang digerakkan oleh kebudayaan. kebudayaan sendiri dipahami sebagai seperangkat sistem pemaknaan atas kehidupan yang bersifat partikular (Billing, 2000: 29).

Paradigma Neo institusionalis melandasi kajian-kajiannya pada pandangan bahwa perekonomian selalu melekat pada hubungan sosial struktural (Blim, 2000: 29). Sepintas pandangan ini menggemakan gagasan Karl Polanyi dan antropolog substantivis. Tetapi berbeda dari Polanyi, Neo-institusionalis tidak membedakan antara perekonomian kapitalis dan perekonomian non kapitalis. Sebuah bentuk perekonomian dilandasi oleh rasionalitas yang sama artinya, daripada mengambil gagasan bahwa rasionalitas suatu perekonomian akan beragam bergantung pada hubungan sosial struktural tempat perekonomian itu beroperasi. Antropolog neo-institusionalis lebih mengikuti tradisi formalis di dalam antropologi ekonomi yang mendasarkan diri pada teori perilaku rasional seperti yang melandasi pemikiran ekonomi neoklasik. Hanya saja cakupan rasionalitas diperluas bukan hanya pada perilaku individu dalam konteks pilihan-pilihan individual.

Sejalan dengan itu, Nash (1981) mengatakan bahwa keragaman karakter historis tentang formasi sosial di bawah dominasi sistem dunia kapitalis, merupakan sumber pokok keragaman praktik kapitalisme yang selalu berkehendak untuk mendominasi. Dalam pengaruh paradigma Marxis, setidaknya ada tiga gejala yang mempengaruhi tema-tema pokok dalam kajian antropologi kapitalisme dalam masyarakat nelayan yaitu

desentralisasi produksi, proses polarisasi, dan dinamika hubungan antara perekonomian di pusat dan pinggiran dunia kapitalis. Ketiga tema tersebut berangkat dari anggapan bahwa kapitalisme yang diperankan oleh pemilik modal di kota Dobo merupakan corak produksi yang inti perekonomiannya bersifat dinamis dalam bentuk pembelian hasil laut berdasarkan musim tangkap. Dalam neo-institusionalis yang menekankan inti kapitalisme, bahwa tindakan pelaku-pelaku ekonomi harus di bawah sistem kapitalisme yang mengatur hubungan sosial dan produksi masyarakat.

Antropolog Joel Kahn (1984: 147), menyatakan bahwa kapitalisme selalu berhubungan erat dengan relasi kelas sosial, penguasaan modal dan eksploitasi kelas. Sehingga modal itu sendiri bukan hanya tentang benda tetapi aspek menyeluruh dari relasi sosial dan produksi. Mengambil Pelajaran dari pemikiran Marx, dapat dipahami bahwa masyarakat kapitalis juga masyarakat historis seperti halnya jenis masyarakat yang secara tradisional dikaji antropolog. Seperti juga masyarakat lainnya di dalam masyarakat kapitalis, terdapat sistem hubungan sosial yang pokok dan merupakan penanda khusus keberadaannya sebagai suatu jenis masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Marx tentang capital, terutama yang dituangkan dalam Das Capital, merupakan salah satu pemikiran penting yang bisa mengantar tampilan-tampilan diferensial yang mencirikan sistem hubungan sosial masyarakat kapitalis tampil ke permukaan untuk diselidiki oleh ilmuwan sosial.

Penetrasi kapitalisme di kota Dobo telah dan terus terjadi hingga sekarang. Penetrasi tersebut bukan hanya bagian dari kebudayaan, tetapi merubah tatanan sosial dan melahirkan nilai-nilai yang sangat baru didalam kehidupan nelayan. Penetrasi tersebut ditopang oleh hasil laut yang berorientasi ekspor. Namun, pertumbuhan masyarakat telah penciptaan pasar-pasar domestik yang substansial diikuti dengan peningkatan standar kehidupan kelas menengah secara terus-menerus sehingga terjadi perselisihan nelayan dengan pemilik modal. Furnivall (2009) menyatakan bahwa, prinsip perekonomian kapitalis dengan “prinsip Capital beranak cucu kapital” bukan hanya salah satu diantara prinsip-prinsip perekonomian yang ada tetapi telah menjadi satu-satunya prinsip yang meresap ke dalam semua relung kehidupan.

Resapan ini seringkali menimbulkan benturan dengan pranata-pranata sosial tradisional yang tidak cocok dengan prinsip akumulasi kapital. Pada tataran struktural, misalnya pada masyarakat nelayan di kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, corak pengorganisasian kerja tradisional berhadapan dengan corak produksi kapitalis. Mereka pada awalnya hidup dengan struktur tanpa kelas dengan pengorganisasian kerja berbasis kekerabatan dengan perburuan sederhana sebagai corak produksi. Saat ini, nelayan hidup dalam corak pengorganisasian kapitalis yang menciptakan resistensi.

Pada tataran sistem budaya, nilai, norma, kebiasaan dan adat istiadat, masih menjadi fenomena kultural yang membantu kehidupan politik secara

ideal. Tetapi tatanan sosial baru yang masuk seiring penetrasi kapital, telah menjadi peta sosial terpenting yang memandu individu-individu dalam kehidupan praktisnya sebagai bagian dari tatanan kapitalis. Sebagaimana diungkapkan oleh Blim (2000), diakui atau tidak, suka atau tidak, sekarang kita hidup di dalam dunia kapitalis.

Bahkan nelayan Bajo yang ada di kota Dobo telah menjual hasil tangkapan mereka demi uang dan belanja kebutuhan hidup kepada kapitalis sebagai bentuk kebiasaan yang berlangsung sekian lama. Oleh karena itu, kapitalisme tidak hanya dilihat hanya sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pasar bebas. Namun, kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga membentuk kebudayaan, sebagai ideologi dan kontrol pasar, dan dapat menyusun kehidupan sosial, membentuk kesadaran, dan menciptakan budaya berdasarkan logika kapital.

2. Ciri-ciri kapitalisme

Ibnu Khaldun (2000: 450) mengatakan “dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi”. Produksi pada dasarnya adalah proses mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam proses ini, manusia memanfaatkan daya-daya yang tersedia di alam, baik itu sumber daya alam, energi, maupun kemampuan manusia itu sendiri. Namun, daya-daya alam itu sendiri tidak otomatis

menghasilkan sesuatu. Tanpa curahan kerja manusia, segala potensi yang ada hanya akan tetap sebagai potensi, bukan kenyataan.

Kerja adalah faktor penentu yang mengaktifkan daya. Tanpa kerja, daya hanya menjadi kemungkinan yang tidak pernah mewujudkan. Tanpa daya, kerja menjadi sia-sia karena tidak ada bahan atau potensi yang bisa dimanfaatkan. Artinya, produksi adalah perpaduan antara daya dan upaya. Daya menyediakan kemungkinan, dan upaya (kerja) mewujudkan kemungkinan itu menjadi realitas konkret berupa barang, jasa, atau bentuk kebutuhan lain. Dalam perspektif ini, produksi tidak hanya tentang menghasilkan barang, melainkan juga tentang membentuk hubungan aktif antara manusia dan alam sebagai sebuah proses kreatif manusia melalui kerja mengaktualisasikan potensi yang tersedia untuk kehidupan.

Kerja berfungsi sebagai jembatan antara potensi yang ada dalam diri manusia dan dari penggunaan unsur alam dan aktualisasinya dalam kehidupan manusia. Kerja adalah dasar perekonomian masyarakat. Organisasi kerja adalah inti sistem perekonomian (Durrenberger, 2005: 124). Ekonomi berkaitan dengan bagaimana pekerjaan sosial didistribusikan di antara anggotanya, siapa yang menjadi pengarah tenaga kerja, siapa yang tidak perlu bekerja, siapa yang mendapatkan dan seberapa besar bagian dari hasil kerja itu, dan melalui kelembagaan apa pekerjaan pekerja didistribusikan dan didistribusikan di antara kelas sosial yang berbeda. Sedangkan Eric Wolf (1990: 73-100) kerja Kapitalis memiliki ciri khas yaitu pemilik modal menguasai alat produksi, dan pekerja menjual

tenaga kerjanya untuk upah. Produksi diarahkan untuk menghasilkan keuntungan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dan hubungan kerja bersifat eksploitasi pasar dan tenaga kerja tidak lagi mengontrol produk kerjanya.

Sedangkan di kota Dobo, realitas ekonomi kapitalis yang di control oleh pemilik modal sangat membutuhkan lembaga dan transaksi. Sedangkan nelayan hanya dianggap atau diperlakukan sebagai tenaga kerja dan terikat pada pemilik modal karena membeli kebutuhan dan perlengkapan pelayaran dan penangkapan dari pemilik modal dan harus menjual hasil tangkapan pada pemilik modal.

3. Komoditi

Proses pembagian masyarakat menjadi pemilik modal dan nelayan di kota Dobo ke dalam kelas-kelas yang secara esensial saling bertentangan selalu disertai dengan gejala ekonomi yaitu proses pencarian dan kepemilikan komoditi laut, yakni terkait dengan jumlah produk yang menjadi komoditi terus-menerus berkurang atau bertambah. Lefebvre (1968: 93) mengatakan, segala hal yang penting dalam memelihara pembagian kelas-kelas sosial dijadikan komoditi. Bukan hanya tanah dan tenaga kerja yang dijadikan komoditi, tetapi juga semua sarana hidup yang dengannya golongan pekerja menghidupi diri, seperti bahan pangan dan perumahan, menjadi komoditi. Justru dengan mengakomodasikan sarana hidup,

pemeliharaan golongan pekerja yang bergantung kepada kerja upahan bisa tetap dilanggengkan.

Marx (1962) mengatakan bahwa kapital bukan hanya alat produksi, bahan mentah sebagai bahan baku, dan produk. Tetapi, Kapital sebagai nilai tukar semua produk yang terkandung di dalamnya adalah komoditi-komoditi. Dengan demikian, capital bukan hanya sejumlah tertentu produk-produk material, tetapi juga sejumlah tertentu komoditi komoditi, nilai-nilai tukar, dan unit-unit sosial.

Pernyataan Marx di atas, mengindikasikan keberadaan capital sebagai sesuatu yang menjadi pokok kapitalisme begitu lekat dengan keberadaan komoditi sebagai kategori ekonomi. Dalam kapitalisme industrial, bentuk sejati kapitalisme adalah uang yang disirkulasikan ke dalam proses yang diawali dengan mengubahnya menjadi komoditi dalam bentuk membeli barang dan jasa, kemudian memasukkannya ke dalam proses produksi dalam rangka memproduksi komoditi yang mengandung nilai lebih.

Meski bukan satu-satunya, kapitalisme adalah corak produksi komoditi termaju. Salah satu wujud kemajuan perekonomian kapitalis adalah kecenderungannya menjadikan segala sesuatu yang bermanfaat dalam penciptaan laba bagi kelas kapitalis sebagai komoditi. Selain itu, kapitalisme juga cenderung memisahkan barang-barang komoditi dari kegunaannya. Kecenderungan inilah yang memungkinkan penciptaan

kebutuhan baru termasuk terhadap benda yang sebelumnya tidak dianggap sebagai komoditi.

Menurut antropolog Arjun Appadurai (1986), komoditi meski dipahami sebagai tipe potensial tertentu yang berbeda dari sekedar produk-produk, barang-barang, artefak-artefak dan bentuk-bentuk sesuatu bikinan manusia lainnya. Menurut antropolog Mary Douglas dan Baron Isherwood (1996), kekhasan komoditi ini karena komoditi merupakan bagian dari suatu sistem informasi kehidupan. Di dalam kehidupan sosial di kota Dobo, nelayan dilihat oleh kapitalis tidak lebih dari hanya sekedar barang atau komoditi yang dibutuhkan untuk melanggengkan kekayaan pemilik modal.

Nelayan yang dianggap sebagai barang atau komoditi menjadi semacam penanda atau penunjuk jalan di dalam hubungan sosial yang menguntungkan pemilik modal. Kedudukan khas nelayan sebagai komoditi tidak hanya berlaku pada ranah pertukaran dan konsumsi, tetapi juga pada ranah hubungan produksinya. Woodward (2007: 37) karena perlakuan manusia menjadi barang atau komoditi dalam konteks masyarakat kapitalis menjadi wujud fisik dari sejarah relasi kapitalis yang melahirkan eksploitasi, keterasingan, dan penindasan kelas.

Hingga saat ini, perekonomian yang dijalankan oleh pemilik modal di Kota Dobo berlandaskan kepada produksi dan pertukaran komoditi melalui pasar mengandaikan pembagian kerja sosial yang luas tentang pelembagaan hak milik pribadi, dan pemisahan golongan produsen langsung dengan sarana produksi dari sini saja kita bisa pahami bahwa

komoditi bukan sekedar barang. Ia lebih merupakan hubungan sosial, bukan pula sembarang hubungan sosial, tetapi hubungan sosial yang eksploitatif. Komoditi dan produksi komoditi tidak hanya mencerminkan hubungan kelas tetapi juga kristalisasi dari hubungan kelas yang eksploitatif.

Dalam komoditi, terdapat nilai guna yang merupakan satu aspek saja dari komoditi. Untuk menjadi komoditi suatu barang atau jasa harus bisa dipertukarkan dengan barang atau jasa lainnya yang berbeda kegunaannya. Kapasitas barang untuk dipertukarkan dengan barang lain disebut nilai tukar. Takaran nilai tukar adalah seberapa banyak suatu barang ditukar dengan barang lain di dalam suatu pertukaran setara. Nilai tukar suatu komoditas merepresentasikan jumlah kerja sosial rata-rata yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dengan perantara uang, hubungan sosial antar produsen disamakan menjadi hubungan antar barang. Sedangkan harga adalah bentuk penampakan (*appearance*) dari nilai tukar dalam masyarakat berbasis pertukaran pasar.

Nilai tukar tersebut bisa muncul secara langsung dalam sistem barter, atau secara tidak langsung melalui mekanisme uang, karena komoditas memperoleh harga sebagai bentuk nilai tukarnya. Sedangkan harga merupakan pantulan dari nilai tukar atau nilai komoditi dari nelayan yang ditentukan sebagai pantulan nilai komoditi dalam kaitanya dengan uang. Dari komoditi yang dihasilkan berupa hasil tangkapan, menghasilkan uang dan pertukaran komoditi, ditentukanlah harga dan nilai bahkan sampai pada

pemberhalaan komoditi atau yang Marx istilahkan dengan fetisisme komoditi yang dipercaya mengandung kekuatan supernatural yang bisa membantu atau melindungi pemiliknya.

Dalam perekonomian kapitalis berbasis uang, nilai komoditi selalu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam harga. Semua orang harus mengubah nilai komoditinya ke dalam nilai uang dan nilai uang ini bisa dikonversikan ke dalam nilai komoditi. Setiap orang harus melalui jalan melingkar untuk mengetahui nilai komoditi yang dipertukarkannya. Istilah lainnya, dari komoditi ke uang, lalu dari uang ke komoditi. Bagi perekonomian kapitalis yang kesatuan ekonomi politiknya mencakup seluruh dunia, keberadaan uang tentu mempermudah pertukaran. Namun keberadaan uang juga menjadikan berbagai hubungan sosial yang memungkinkan keberadaan komoditi menjadi samar atau terkubur di balik tirai uang sehingga komoditi tidak lagi menyandang tanda lahir dari asal-usulnya (Marx, 1962).

Uang merupakan mesin anonimitas hubungan sosial dalam masyarakat. Semua komoditi yang bisa dikonversi ke dalam nilai uang atau harga dianggap punya daya di dalam dirinya sendiri terlepas dari hubungan sosial yang membuatnya mengada. Pada pemilik modal, komoditi diimani mempunyai nilai dalam dirinya sendiri terlepas dari proses kerja dan hubungan antar orang di dalam produksi dan pertukarannya di dalam perekonomian kapitalis. Hubungan antara pemilik modal dan nelayan dalam proses produksi terkubur di bawah hubungan antar barang sebagai

sarana produksi, bahan baku nelayan, dan tenaga kerja saat melaut yang ditentukan oleh pemilik perahu atau tenaga kerja titipan pemilik modal. Keyakinan ini mengabaikan kenyataan bahwa sarana produksi dan tenaga kerja bukan sekedar mengandung nilai guna (aspek fisik) tetapi juga nilai tukar (aspek nilai) yang memunculkan diri hanya dalam pertukaran antara orang.

Komoditi dalam Kerangka Foucault (1977), bukan hanya benda berharga, melainkan juga produk dari hubungan kekuasaan dan wacana. Sesuatu menjadi komoditi bukan semata karena nilai ekonominya, tetapi karena mekanisme sosial, politik, dan pengetahuan mengkonstruksikannya demikian. Misalnya tubuh manusia di era modern menjadi "komoditi" yang dikontrol lewat disiplin. Tubuh diatur supaya produktif dan berguna.

Komoditas lahir bukan netral, tapi hasil dari operasi kekuasaan yang membentuk nilai, norma, dan makna. Komoditas itu dihasilkan oleh rezim wacana tentang yang dianggap "penting", "normal", atau "berharga" diproduksi lewat institusi. Dengan demikian, komodifikasi adalah bentuk kontrol sosial yaitu mengatur tentang yang diperdagangkan, pengakses, penentuan nilai. Dalam pendekatan Foucaultian, harga komoditi adalah hasil dari operasi kekuasaan dan produksi wacana, bukan sekedar benda bernilai tukar.

Nelayan bisa dipandang sebagai komoditi ketika pengetahuan, tubuh, identitas dan tenaga nelayan dikontrol, dan dimanfaatkan untuk mendukung produksi ekonomi. Nelayan Bajo juga tidak hanya dipandang sebagai

produsen hasil laut, tapi sebagai tubuh-tubuh produktif yang diatur oleh sistem kekuasaan pemilik modal yang memahami adanya biopolitik sebagai wujud dari kehidupan nelayan (produksi dan mobilitas) diatur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pasar global. Produksi wacana juga dirancang oleh pemilik modal sebagai target dan membingkai nelayan bukan sebagai subjek bebas, tapi sebagai objek intervensi.

4. Tentang bagi hasil

Secara ekonomis, kelas kapitalis (pemilik modal) tidak sekadar menyimpan uang, mereka wajib mengubah uangnya menjadi "modal-variabel" (variable capital) agar dapat memperbesar nilai dan mengakumulasi lebih banyak uang. Adanya capital-variabel mencerminkan kehidupan golongan sosial yang hidup dari kerja upahan. Nilai capital-variabel yang secara empiris mewujud ke dalam tingkat upah rata-rata merupakan cermin dari pertentangan dan perjuangan kelas dalam masyarakat kapitalis. Para kapitalis menghendaki bagi hasil tetap rendah dibandingkan dengan tingkat laba dan durasi waktu kerja tetap panjang. Sementara itu, nelayan Bajo menginginkan sistem bagi hasil yang baik.

Pranata kepemilikan pribadi dan penguasaan kolektif atas sarana produksi, dan revolusi sosial, soal bagi hasil merupakan persoalan yang paling menyentuh kesadaran sehari-hari kedua kelas (pemilik modal dan nelayan Bajo). Di dalam pola kapitalisme tersebut, peningkatan harga hasil tangkapan dan bagi hasil yang diperoleh dari belas kasihan kelas kapitalis dengan menentukan harga hasil tangkapan nelayan dari jenis yang

berbeda, misalnya jenis ikan, harga gelembung ikan, dan jenis telur ikan terbang.

Dalam pandangan antropolog ekonomi Karl Polanyi (2001: 74-75), salah satu keajaiban kapitalisme ialah menjadikan tenaga kerja sebagai komoditi semua hal yang penting bagi produksi industrial, merupakan tidak dihasilkan dari proses produksi industrial seperti tanah, Tenaga Kerja dan uang telah dijadikan komoditi. Salah satu wujud keanehan yang diakibatkan komodifikasi tenaga kerja ialah karakter transaksi jual beli tidak seperti komoditi lainnya, tenaga kerja pada hakikatnya bukan sesuatu yang penting, akan tetapi proses kerja dan uang yang dihasilkannya yang sangat penting.

Sebelum dan sesudah proses kerja, tenaga kerja menyatu kembali dengan diri dan kehidupannya. Sepanjang proses kerja inilah, tenaga kerja mengada sebagai komoditi komoditi aneh yang tanpa kehadirannya dalam produksi dan kapitalis hanya segerombol penimbun uang bukan kapitalis yang menghidupkan manusia lain.

Seperti halnya komoditi, nelayan Bajo hanya dianggap tubuh yang memiliki kekuatan fisik dan memiliki nilai. Aspek fisiknya adalah sebagai manusia yang bekerja dengan segala ciri fisiknya yang memungkinkan tenaga kerja di tampung dan dikerahkan. Sementara itu aspek nilai ialah nilai tukar tenaga kerja dari sudut pandangan kapitalis yang bersifat abstrak. Perhatian kapitalis terutama pada aspek nilai tenaga kerja yaitu

kompleksitas kemampuan nelayan Bajo melakukan aktivitas untuk melakukan penangkapan dan menjualnya kepada kepada pemilik modal.

Pemilik modal di kota Dobo melihat nelayan memiliki nilai tukar atau sebagai manusia pekerja, karena hanya tenaga kerja yang membuat tempat penampungan ikan bisa menghasilkan uang, dan hanya karena curahan kerjalah nilai-nilai hasil tangkapan teralihkan dan nilai lebih dihasilkan. Pendapatan nelayan yang ditentukan berdasarkan harga tangkapan, tidak ditentukan dari waktu kerja, tapi dari seberapa banyak jumlah ikan yang didapatkan, yang diukur dengan timbangan.

D. Teori relasi kuasa

Kemajuan kesadaran, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang begitu pesat dalam dunia modern, dianggap telah mampu membebaskan manusia, justru memperlihatkan paradoks yaitu manusia menjadi semakin tidak manusiawi. Realitas ini muncul karena kekuasaan tidak lagi bekerja hanya melalui paksaan fisik, melainkan melalui pengendalian tingkah laku, etika, sopan santun, bahkan pembentukan subjektivitas. Dalam analisis Michel Foucault (1977), kekuasaan modern tidak hanya menindas, tetapi membentuk subjek, beroperasi secara halus, tidak kasat mata, melalui norma, aturan, disiplin, dan wacana serta menggunakan pengetahuan dan teknologi sebagai instrumen utama untuk mengawasi, mengontrol, dan mengorganisasikan kehidupan.

Karena itu, dalam masyarakat modern, yang terjadi adalah pembentukan jaringan wacana yang rumit, beragam, khas, dan menekan identitas individu yang dibentuk, diatur, bahkan dibungkam melalui mekanisme-mekanisme ini. Setiap usaha resistensi atau menyembunyikan semangat resistensi justru memperlihatkan bagaimana kekuasaan meresap ke dalam semua aspek kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah rangsangan kekuasaan bekerja dari berbagai arah (polimorf) dan tertata dalam sistem yang kompleks dan terstruktur untuk mengendalikan manusia dalam bidang yang jauh lebih luas daripada kekuasaan tradisional yang bersifat langsung atau represif.

Pemikiran Foucault memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana kekuasaan bekerja di dalam masyarakat modern. Berbeda dengan teori kekuasaan klasik yang melihat kuasa sebagai dominasi hierarkis yang bersifat represif, Foucault mengembangkan suatu konsep radikal yaitu kekuasaan tersebar, produktif, dan melekat dalam semua hubungan sosial. Kekuasaan tidak hanya menindas, tetapi juga membentuk identitas, perilaku, bahkan kebenaran itu sendiri melalui produksi pengetahuan dan jaringan wacana.

Dengan demikian, relasi kuasa tidak hanya terjadi antara negara dan rakyat, atau antara atasan dan bawahan, melainkan menjalar ke dalam institusi, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan teknologi modern. Foucault (1977) menunjukkan bahwa kuasa dan pengetahuan saling berkelindan dalam jaringan kompleks yang membentuk realitas sosial. Kuasa bukan

sesuatu yang dimiliki, tetapi sesuatu yang dijalankan dan beroperasi dalam hubungan antarindividu, kelompok, dan institusi.

1. Relasi kuasa dalam realitas sosial nelayan

Bagi Foucault (2002), kekuasaan tidak terpusat atau dimonopoli oleh satu kalangan atau kelas tertentu. Sebaliknya, kekuasaan berada dalam strategi yang dioperasikan pada setiap tingkatan kehidupan sosial, mulai dari relasi antar individu hingga struktur institusi besar seperti negara dan ekonomi. Kekuasaan menurut Foucault bukan hanya alat dominasi represif, melainkan mekanisme produktif. Kekuasaan tidak hanya membatasi atau melarang, tetapi menciptakan realitas sosial, membentuk subjek, mengatur norma, dan menghasilkan pengetahuan. Kekuasaan juga tersebar dalam jaringan hubungan, bukan hanya mengalir dari atas ke bawah.

Dalam pemikiran Foucault, terdapat penggunaan “strategi” merujuk pada cara-cara operasional kekuasaan yang tidak berpusat pada individu atau lembaga tertentu, melainkan tersebar melalui relasi sosial dan praktik-praktik diskursif di seluruh masyarakat. Kekuasaan sebagai rangkaian strategi tidak dilihat sebagai properti (yang bisa dimiliki), tapi sebagai relasi yang dijalankan melalui strategi. Kekuasaan terjadi ketika ada usaha untuk mengarahkan, membentuk, atau mempengaruhi tindakan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, kekuasaan adalah praktik strategis, bukan hanya dominasi paksa.

Strategi beroperasi di semua tingkatan karena tidak ada "pusat" kekuasaan mutlak dan setiap individu juga bisa menjadi "pelaksana" strategi kekuasaan, sadar atau tidak sadar. Foucault menekankan bahwa strategi kekuasaan selalu berkaitan dengan permainan kekuatan (relations of force) yang menekankan hubungan sosial penuh dengan usaha saling mempengaruhi (strategi untuk mengarahkan tindakan orang lain) dan usaha resistensi (strategi untuk menolak arahan tersebut). Dengan demikian, kekuasaan selalu dinamis, bergerak, berubah dan beradaptasi.

Perlu diketahui bahwa tidak ada strategi kekuasaan yang netral karena setiap produksi pengetahuan, norma sosial, bahkan konsep "kebenaran", selalu melibatkan pilihan strategis yaitu siapa yang berbicara, apa yang dinormalisasi dan yang dikecualikan. Ini berarti bahwa wacana (diskursus) sendiri adalah produk dari strategi kekuasaan. Melalui relasi kuasa, tercipta dominasi. Menurut Foucault (dalam wirawan, 269: 2012) dominasi adalah hasil dari interaksi antar relasi kuasa, bukan hanya tindakan satu pihak atas pihak lain. Relasi kuasa juga selalu berubah-ubah dan dominasi terjadi saat hubungan kuasa menjadi tetap dan asimetri tanpa ruang resistensi. Dengan kata lain, dominasi bukan hasil dari "kepemilikan kuasa", tapi dari proses mengunci relasi kuasa sehingga satu pihak mengendalikan yang lain secara terus-menerus.

Menurut Michel Foucault (1997), untuk memahami aspek politik dari kekuasaan, kita tidak bisa lagi bergantung pada model-model tradisional seperti ideologi (sebagai representasi kebenaran atau ilusi), metafora

kepemilikan (seolah-olah kuasa adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok) dan model kontrak atau penguasaan (seperti teori kontrak sosial antara penguasa dan rakyat). Pendekatan tersebut dianggap tidak memadai untuk menjelaskan bagaimana kuasa benar-benar bekerja dalam masyarakat modern.

Relasi kuasa dalam realitas nelayan Bajo dan pemilik modal, tidak sekadar dimiliki atau dipertukarkan, melainkan tersebar dalam jaringan hubungan, dipraktikkan dalam berbagai teknik pengaturan dan pemantauan perilaku sehari-hari, dan konstruksi identitas individu. Dengan cara ini, pada dasarnya nelayan Bajo dan pemilik modal sedang bermain dalam siasat politik yang tidak hanya dipahami sebagai urusan regulasi, tetapi sebagai jaringan operasi mikro-kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial dalam seluruh dimensinya melalui praktik, norma, dan perilaku yang mendasari mereka untuk berpikir dan bertindak.

2. Kontrol aktivitas nelayan

Dalam kerangka teorinya tentang disiplin, Michel Foucault (1997) menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama kekuasaan adalah mengontrol aktivitas individu. Kontrol ini terjadi bukan hanya melalui larangan langsung, tetapi lewat pengaturan rinci terhadap waktu, ruang, gerakan, dan aktivitas sehari-hari. Menurut Foucault, tubuh manusia diperlakukan sebagai "mesin" yang harus dikelola, dilatih, dan dioptimalkan untuk tujuan produktivitas dan ketaatan. Disiplin mengontrol tubuh bergerak, kapan

harus bekerja, kapan beristirahat, bagaimana berbicara, bagaimana duduk, bahkan bagaimana berpikir.

Foucault menyebut beberapa teknik kunci dalam kontrol aktivitas, antara lain pembuatan jadwal (timetables) pengawasan, orang-orang ditempatkan dalam ruang tertentu, pengaturan gerak (movement regulation), dan pencatatan dan penilaian terus-menerus. Foucault (2002), menunjukkan bahwa kuasa beroperasi melalui mekanisme besar yaitu pendisiplinan kekuasaan (disciplinary power) yang berfokus pada mengawasi, melatih, normalisasi, dan membentuk tubuh individu melalui aturan-aturan mikro melalui pengawasan (surveillance), pengujian (examination), dan pencatatan (documentation).

Tujuan utama dari kontrol aktivitas dalam disiplin untuk meningkatkan produktivitas individu agar lebih berguna dan efisien, menanamkan ketaatan agar membentuk individu menjadi patuh secara otomatis terhadap peraturan sosial, dan membentuk subjek yang "normal" agar menyesuaikan perilaku individu dengan standar yang diinginkan oleh institusi sosial. Sedangkan pada aspek pemilik modal, kontrol aktivitas sebagai mekanisme penting dari kekuasaan disipliner, yang berfungsi untuk mengatur secara rinci perilaku dan pikiran dalam rangka menciptakan nelayan Bajo yang produktif, patuh, dan teratur.

3. Pengawasan hierarkis nelayan

Menurut Michel Foucault (1997), pelaksanaan disiplin bergantung pada mekanisme “pemantauan yang tidak terlihat (invisible surveillance)”. Disiplin tidak sekadar menggunakan kekerasan atau paksaan fisik, melainkan membangun sistem kontrol dengan prinsip bahwa “yang mengawasi selalu bisa melihat, dan yang diawasi tidak pernah tahu kapan atau bagaimana mereka dilihat”. Teknik pemantauan dalam sistem disipliner dirancang agar individu merasa terus diawasi, meskipun tidak selalu benar-benar diawasi. Mekanisme ini menyebabkan internalisasi kontrol individu mulai mengatur dirinya sendiri, bertindak seolah-olah selalu dalam pengawasan.

Contoh utama yang diberikan Foucault adalah konsep Panopticon yaitu sebuah menara yang bangun dan tempatkan penjaga untuk mengawasi tahanan tanpa mereka tahu kapan sedang diperhatikan. Efeknya adalah tahanan selalu berperilaku sesuai aturan, karena mereka mengasumsikan bahwa mereka diawasi setiap saat. Melalui mekanisme pengawasan tersebut, Foucault menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya menghukum perilaku, tetapi juga menghasilkan pengetahuan baru tentang manusia. Melalui pengamatan terus-menerus, individu diklasifikasikan, dinilai, dan dicatat siapa yang patuh, siapa yang menyimpang, siapa yang perlu dikoreksi. Hasil dari pengetahuan ini digunakan untuk mengatur lebih lanjut perilaku masyarakat, menciptakan standar yang "normal" dan yang "abnormal". Dengan kata lain, melalui mekanisme pemantauan

tersembunyi, disiplin tidak hanya mengontrol manusia, tetapi menciptakan subjek manusia sebagai objek pengetahuan.

Pemantauan kemungkinan pelaksanaan kuasa 'relasional' yang mendukung dirinya dengan mekanisme tersendiri. Teknik pemantauan, bentuk fisik dari penguasa, penguasaan atas tubuh yang dilaksanakan, berdasarkan hukum penguasa yang bersifat informal terhadap segala yang menyangkut kelalaian, ketidaktepatan dan ketidakberhasilan dalam proses penangkapan yang berujung pada hukuman.

Menurut Foucault (1997), dalam rezim disiplin, hukuman tidak lagi hanya berupa sanksi keras atau kekerasan fisik seperti pada masa pra-modern. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, hukuman berkembang menjadi sebuah sistem ganda yakni terdiri atas hukuman (punishment) dan penghargaan (reward). Hukuman dalam konteks disipliner berfungsi untuk mengoreksi, bukan semata-mata membalas kejahatan yang didesain untuk menandai penyimpangan dari norma, memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan dan menciptakan perubahan perilaku ke arah yang "benar". Hukuman dalam disiplin bersifat terukur, terencana, dan bertujuan memperbaiki, bukan menghukum secara brutal seperti eksekusi publik pada abad pertengahan.

Disiplin juga menggunakan penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan memberikan insentif kepada individu untuk menyesuaikan diri dengan norma. Penghargaan bisa berupa pujian, penghargaan simbolik dan status sosial atau hak istimewa lainnya.

Pengganjaran menciptakan norma, bukan hanya dipaksakan melalui rasa takut akan hukuman, tetapi juga melalui keinginan untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan. Fungsi sistem ganda hukuman dan pengganjaran oleh pemilik modal terhadap nelayan adalah untuk membentuk perilaku melalui pengaturan ketat, menumbuhkan internalisasi norma agar nelayan Bajo belajar berperilaku sesuai standar bukan hanya karena takut dihukum, tetapi juga karena ingin memperoleh ganjaran. Pemilik modal juga mampu memproduksi subjek-subjek patuh yang "secara sukarela" tunduk pada aturan, karena nelayan Bajo mengejar ganjaran atau takut kehilangan hak istimewa yang diberikan oleh pemilik modal.

D. Teori resistensi

1. Gerakan resistensi

Resistensi merupakan bentuk perlawanan yang muncul akibat ketidakadilan yang dialami oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Gerakan resistensi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti demonstrasi, konflik sosial, maupun penyampaian aspirasi melalui jalur resmi. Dalam konteks sosial, resistensi berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak yang terabaikan. Gerakan resistensi sebagai suatu tindakan kolektif yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melawan, menolak, atau mengubah situasi yang dianggap tidak adil, menindas, atau merugikan mereka.

Menurut Landsberger (1981), resistensi adalah sebuah konsep yang merujuk pada upaya atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menanggapi ketidakadilan yang dialami dalam kehidupan sosial. Dalam pandangannya, resistensi tidak hanya terbatas pada protes terbuka atau demonstrasi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perlawanan yang lebih halus atau tersembunyi, seperti perlawanan melalui kehidupan sehari-hari, sikap diam, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap norma-norma yang dianggap menindas.

Resistensi sebagai reaksi terhadap kekuasaan atau sistem yang dianggap sebagai bentuk penindasan atau ketidakadilan. Hal ini mencakup berbagai tingkatan, dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, dan bisa terjadi baik di tingkat individu maupun kelompok. Selain itu, resistensi juga bisa terjadi dalam berbagai ruang sosial, seperti di tempat kerja, di dalam keluarga, atau dalam masyarakat secara keseluruhan.

Scott (1976) menjelaskan bahwa, resistensi sering kali muncul sebagai cara bagi individu atau kelompok untuk mempertahankan identitas dan hak-hak mereka di tengah tekanan sosial dan politik. Meskipun resistensi tampak kecil, namun tindakan tersebut bisa memiliki dampak besar dalam menciptakan perubahan sosial jangka panjang. Resistensi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menanggapi atau melawan struktur kekuasaan yang dominan, yang dianggap menindas atau tidak adil. Dalam pandangannya, resistensi adalah cara untuk menanggapi

dan menentang struktur sosial atau politik yang mengendalikan dan membatasi kebebasan individu.

Scott (1976) menekankan pada pentingnya kekuatan budaya dalam memahami resistensi. Menurutnya, resistensi bisa ditemukan tidak hanya dalam bentuk perlawanan politik atau sosial, tetapi juga dalam bentuk perlawanan terhadap norma budaya dan nilai-nilai yang telah mapan. Dalam hal ini, resistensi bukan hanya berupa aksi fisik atau protes besar, tetapi bisa juga berupa perubahan sikap, perilaku, dan cara berpikir yang secara bertahap mengguncang atau mengubah struktur sosial dan budaya.

Scott (1998), juga mengatakan bahwa resistensi sebagai cara bertahan dan menciptakan perubahan sosial dan ekonomi lebih kompleks dari sekadar tindakan politik terbuka yang melibatkan nilai-nilai sosial dan moral yang mendalam, yang seringkali dipahami hanya oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam aktivitas sosial yang ditopang oleh kecerdasan praktis dan keterampilan lokal. Namun Scott (2000), menegaskan bahwa orang-orang kalah tidak punya kekuatan politik atau militer untuk melawan secara langsung. Tapi, mereka tetap menolak dominasi, dan bentuk resistensi kecil untuk menjaga harga diri mereka dan menggerogoti kekuasaan elite secara perlahan-lahan.

Orang yang tertindas sangat jarang melakukan pemberontakan besar, namun sebaliknya, mereka lebih sering melakukan bentuk resistensi kecil, diam-diam, dan tersembunyi, seperti memperlambat pekerjaan, berpura-pura tidak mengerti, Mencuri kecil-kecilan, Merusak alat secara halus,

bersembunyi, Membocorkan informasi dan Menghindari pajak atau upeti. Resistensi tersebut terjadi dengan cara tidak frontal, tapi konsisten untuk melumpuhkan kekuasaan dari dalam (Scott, 2000).

Scott (2000) menekankan bahwa resistensi kecil bukanlah gejala menuju revolusi. Karena kebanyakan masyarakat kecil tidak memiliki visi besar untuk mengganti sistem, akan tetapi hanya ingin hidup lebih layak. Dengan demikian, resistensi sehari-hari tidak bertujuan merevolusi sistem, melainkan mempertahankan martabat dan memperjuangkan kehidupan yang lebih adil bagi kelompok-kelompok kecil, sebagai ekspresi tuntutan keadilan praktis, bukan gerakan untuk merebut kekuasaan.

Dengan memahami pemikiran resistensi yang dikemukakan oleh James Scott, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan nelayan Bajo itu juga bisa dipahami sebagai cara mempertahankan keadilan. Nelayan Bajo tidak memiliki kekuatan untuk menggulingkan sistem, tapi lewat resistensi kecil dapat memperjuangkan keadilan dalam dunia yang tidak adil yang dikuasai oleh pemilik modal. Nelayan lain dalam kelompok atau masyarakat dapat tergerak untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan resistensi dengan harapan adanya manfaat atau keuntungan di masa depan. Ini mencerminkan pemahaman bahwa tujuan jangka panjang dan perubahan sosial dari resistensi dapat dicapai melalui semangat, solidaritas dan kerjasama kolektif.

Seiring berjalannya waktu, gerakan resistensi ini berkembang untuk melepaskan diri dari mekanisme kontrol sosial. Di sisi lain, resistensi

nelayan Bajo sebagai upaya untuk menangani krisis dengan membangun kepercayaan di kelompok nelayan sebagai elemen solidaritas dan kebangkitan untuk melawan dominasi pemilik modal.

2. Karakteristik gerakan resistensi

Resistensi biasanya dipicu oleh ketidakadilan, penindasan, atau ketidaksetaraan yang dialami oleh individu atau kelompok. Resistensi merujuk pada upaya atau tindakan untuk menentang, melawan, atau menanggapi dominasi, kekuasaan, atau pengaruh dari pihak yang lebih kuat. Karakteristik resistensi bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, politik, atau budaya. Karakteristik resistensi mencakup perlawanan yang tersembunyi, bentuk non-kekerasan, keterlibatan kelompok terpinggirkan, dan tujuan untuk mengubah struktur sosial atau kekuasaan yang ada.

Resistensi sering kali datang dari kelompok yang terpinggirkan atau mereka yang berada di posisi lemah dalam hierarki sosial atau politik. Kelompok ini mungkin tidak memiliki sumber daya atau kekuatan untuk melawan secara langsung, tetapi mereka menggunakan taktik kreatif dan strategi kolektif untuk menanggapi ketidakadilan. Meskipun sering kali tidak tampak jelas, resistensi adalah bentuk perlawanan yang sangat penting dalam perjuangan melawan ketidakadilan, dan bisa berkembang dengan cara yang inovatif dan adaptif. Melalui solidaritas kolektif dan strategi-strategi cerdas, resistensi memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut Burke (2003), gerakan perlawanan bukan sekadar soal kekerasan atau pemberontakan, tapi bentuk ekspresi sosial dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kekuasaan. Gerakan perlawanan memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali. Pertama, aspek durasi, yang berkaitan dengan seberapa lama suatu gerakan bertahan bergantung pada daya dukungnya, siapa yang bergerak, siapa yang memandunya, dan mengapa orang-orang terlibat sangat ditentukan dari daya dukung yang memadai. Kedua, kekuatan, yang berkaitan dengan gerakan sangat mudah dihancurkan karena berhadapan dengan otoritas pemerintah, sehingga perjuangan tidak menghasilkan hasil yang signifikan, dan gerakan perlawanan akan berhenti dengan sendirinya.

Sementara itu, Douglas dan Waksler (dalam Santoso, 2002) menyatakan bahwa terdapat empat model perlawanan. Yang pertama adalah perlawanan terbuka, yang digambarkan sebagai perkelahian, demonstrasi, atau konflik. Kedua, perlawanan tersembunyi, yang muncul dengan perilaku mengancam. Ketiga, perlawanan agresif, yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang berharga. Keempat, perlawanan defensif, yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri.

Namun terdapat dua jenis resistensi yang digambarkan oleh Scott yaitu resistensi yang bersifat nyata dan resistensi yang bersifat insidental (Scott, 1993: 305). Resistensi insidental biasanya tidak terorganisasi, sistematis, individualistis, untung-untungan, tanpa pamrih, dan tidak memiliki akibat revolusioner. Sebaliknya, perlawanan yang sungguh-

sebenarnya adalah sistematis, terorganisasi, dan kooperatif, berprinsip dan mengandung gagasan dan tujuan untuk meniadakan dominasi penindasan.

Dalam kebanyakan kasus, resistensi yang sifatnya insidental dilakukan secara individual dan dimanifestasikan melalui tindakan pembangkangan atau tindakan yang tidak terorganisir yang menimbulkan kekacauan. Sebagai tambahan, Scott (1976) menggunakan istilah resistensi tertutup, yang dilakukan secara individu, dan perlawanan publik, atau terbuka. Perlawanan terbuka adalah perlawanan yang didasarkan pada proses mobilisasi partisipan, memiliki tujuan yang jelas, dan dilakukan atas nama individu. Perlawanan tertutup adalah pembangkangan secara sembunyi-sembunyi.

Resistensi juga merupakan respons perubahan atau pemaksaan yang datang dari luar, baik dari pemerintah, pasar, atau kekuatan sosial yang lebih besar. Scott (1976) berargumen bahwa, pada dasarnya manusia tidak hanya tunduk pada struktur kekuasaan atau penindasan, tetapi juga sering terlibat dalam bentuk-bentuk resistensi yang lebih subtil dan berkelanjutan. Terdapat jenis resistensi yang diidentifikasi oleh Scott (1976) yaitu pertama, resistensi pasif, seperti penundaan pekerjaan, sabotase kecil, atau pembohongan kepada pihak berwenang. Seseorang tidak secara terbuka menentang kebijakan yang tidak mereka sukai, tetapi mereka akan menghindari atau memanipulasi sistem untuk bertahan hidup. Ini adalah bentuk resistensi yang tidak langsung dan lebih sulit dideteksi oleh pihak berwenang.

Kedua, revolusi moral ekonomi. Scott (1976) menyebutkan bahwa individu biasanya memiliki "moral ekonomi," yaitu seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan ekonomi, yang didasarkan pada konsep keadilan sosial, keberlanjutan, dan kelangsungan hidup. Ketika norma-norma ini terancam oleh kebijakan atau kondisi eksternal, resistensi bisa muncul dalam bentuk protes atau perlawanan terbuka. Ketiga, pemberontakan terorganisir. Meskipun jarang terjadi, pemberontakan terbuka dapat terjadi ketika keadaan menjadi sangat menindas.

Pada aspek resistensi, biasanya melibatkan mobilisasi kolektif, Scott (1976) menunjukkan bahwa bentuk resistensi ini seringkali didasarkan oleh pelanggaran terhadap norma moral ekonomi, sehingga masyarakat terpaksa untuk melawan. Keempat, moral ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Resistensi yang digambarkan Scott (1976) bukanlah tentang perlawanan terbuka, tetapi lebih kepada cara hidup sehari-hari yang secara implisit menentang kebijakan eksternal yang mengganggu keseimbangan hidup. Ini bisa terjadi melalui strategi seperti menghindari aturan atau mengorganisir pasar untuk menghindari eksploitasi.

E. Kerangka Konsep dan Alur Pikir Penelitian

Relasi antara pemilik modal dan nelayan Bajo di kota Dobo tidak terjadi begitu saja, tetapi memiliki genealogi yang tampak nyata sebagai kondisi historis. Penggunaan istilah genealogi diupayakan mengeksplorasi adanya relasi sosial, diskursus yang ada antara pemilik nelayan Bajo dan

pemilik modal. Genealogi juga pada dasarnya merupakan cara menyelidiki sejarah ide, praktik, dan institusi, bukan untuk mencari satu "asal-usul murni" (origin), tapi untuk mengungkap aturan tersembunyi, relasi kekuasaan, dan kondisi-kondisi yang membuat suatu pengetahuan atau norma jadi mungkin.

Melalui genealogi, dapat diamati aktivitas ekonomi pemilik nelayan Bajo dan pemilik modal yang rasional ketika mereka mendukung kepentingan atau pencapaian tujuan masing-masing. Namun praktik kapitalisme yang diperankan oleh pemilik modal di kota Dobo, sangat berlandaskan pada hubungan-hubungan sosial eksploitatif. Pandangan yang melekat dari praktik kapitalis pada pemilik modal yaitu harus melakukan perluasan dominasinya atas formasi-formasi sosial non-kapitalis ke seluruh nelayan untuk mempengaruhi corak produksi ikan. Pemilik modal juga melakukan praktek penguasaan dan melihat nelayan sebagai benda atau komoditi dengan cara menentukan harga kebutuhan nelayan, menentukan harga tangkapan dan penyitaan aset nelayan sehingga nelayan terpinggirkan dari derajat kemanusiaan (alinenasi).

Pada aspek yang lain, genealogi kuasa dan pengetahuan dari pemilik modal terhadap nelayan Bajo saling berkaitan erat satu sama lain. Pelaksanaan kuasa itu terjadi karena pemilik modal eksis sebagai rezim wacana yang mampu membentuk kebenaran dalam setiap kebudayaan dan sejarah. Kebenaran itu bukan sesuatu yang tetap atau esensial, melainkan hasil dari proses sosial, politik, budaya dan sejarah di kota Dobo.

Pemilik modal juga memperoleh pemahaman baru tentang gugus-gugus diskursif. Pemahaman terutama terkait dengan proses penciptaan dan transmisi diskursif yang menghasilkan keteraturan-apriori nelayan Bajo. Proses ini terjadi karena gugus-gugus diskursif menyebarkan pengetahuan dan kekuatan yang tidak bebas dari keterbatasan, seleksi, dan kontrol yang ketat terhadap nelayan Bajo.

Dengan adanya kontrol terhadap harga kebutuhan nelayan, harga hasil laut, dan kontrol aktivitas nelayan oleh kapitalis yang dilakukan secara masif, sehingga nelayan Bajo menentang pemilik modal yang menguasai mereka dan mengklaim kehidupan mereka. Resistensi ini sebenarnya berubah menjadi kekuatan politik dan pertentangan kelas yang berfungsi sebagai agen untuk membawa perubahan sosial ke dalam masyarakat. Selain gerakan sosial, nelayan Bajo menunjukkan resistensi dalam bentuk yang sungguh-sungguh, ini adalah perlawanan yang masuk akal, sistematis, terorganisir, kooperatif, dan berprinsip progresif yang menghasilkan perubahan tatanan sosial, budaya dan ekonomi.

Dengan berpedoman pada konsep genealogi, teori kapitalisme, teori relasi kuasa, dan teori resistensi, maka secara komprehensif kerangka konsep dan alur pikir penelitian saya susun secara sistematis sebagai berikut:

